



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Mei 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROMI SUNDARA
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PENGADAAN,
PERLENGKAPAN DAN FASILITAS PERSIDANGAN
3. NHK : 136540

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m ² /45 m ² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m ² /36 m ² di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	300.000.000
1. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
3. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER ULTIMATE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
4. MOTOR, KAWASAKI KLX BF SE Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.176.391
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.515.176.391
III. HUTANG	Rp.	370.793.800
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.144.382.591

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



-
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Oktober 2018**.
 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.